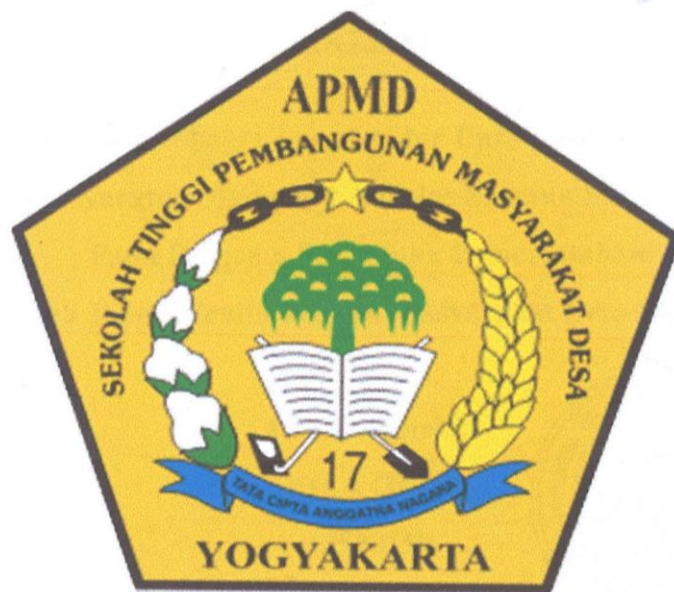


**RELASI PEMERINTAH DESA DAN POKDARWIS DALAM  
MENGEMBANGKAN DESA WISATA BLUE LAGOON**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mencapai Derajat Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Disusun oleh :**

**AFILA OFITA**

**18520159**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2022**



**RELASI PEMERINTAH DESA DAN POKDARWIS DALAM  
MENGEMBANGKAN DESA WISATA BLUE LAGOON DI KALURAHAN  
WIDODOMARTANI, KAPANEWON NGEMPLAK, KABUPATEN  
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**

**Disusun Oleh :**

**AFILA OFITA**

**18520159**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA (1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta :

Hari : Jumat  
Tanggal : 29 Juli 2022  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### Susunan Tim Penguji

**Pembimbing ( Ketua Tim Penguji)**

**Dra. Sri Utami, M.Si**

**Penguji I**

**Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP.,M.A**

**Penguji II**

**Dra. Tri Daya Rini, M.Si**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Ilmu**  
**Pemerintahan**  
**Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afila Ofita

NIM : 18520159

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **"RELASI PEMERINTAH DESA DAN POKDARWIS DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA BLUE LAGOON"** penelitian di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



AFILA OFITA

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehinggasaya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Saya ingin mempersembahkan Skripsi ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya :

1. Untuk Tuhan Yesus Kristus, because **GOD IS GOOD**.
2. Kedua Pahlawan saya, Bapak Otnel dan Mama Bethi yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa dan semangat tiada henti untuk masa depan saya. Karya ini saya persembahkan untuk Bapak dan Mama meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan Bapak Mama untukku, semangat mendidiku, terimakasih sudah menjadi panutan terbaik buat saya.
3. Untuk Kakak-kakakku Aslipin, Perce Gelinda, Mai Sri Lenna, Mai Ri fanni, Joko Pendawa dan Adik Margaret. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya, lalu terima kasih juga untuk jajan nya.

Yogyakarta, 25 Juli 2022



Afila Ofita

## MOTTO

"Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang"

(Amsal 23:18)

"Perjalanan seribu mil, dimulai dengan satu langkah"

(Lau Zhou)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Skripsi dengan judul Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tentu saja Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD " APMD " Yogyakarta.
2. Dra. Sri Utami, M.Si, yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan Skripsi.
3. Bapak / Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD "APMD" Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Untuk almamaterku STPMD "APMD" Yogyakarta.
5. Untuk teman-teman mahasiswa program studi ilmu Pemerintahan angkatan 2018.
6. Untuk teman-temanku, Sarniati Ina Ambu dan masih banyak nama-nama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semua kasihnya.
7. Untuk partnerku Kakak Orri Wardana, terima kasih untuk bantuan yang begitu besar baik tenaga, waktu dan pemikirannya.

Demikian Skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran

dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 29 Juli 2022



Afila Ofita



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	x
INTISARI.....	xi
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	3
C. TUJUAN PENELITIAN .....	3
D. MANFAAT PENELITIAN.....	4
E. LITERATUR REVIEW.....	4
F. KERANGKA KONSEPTUAL.....	7
1. Relasi.....	7
2. Pemerintah Desa.....	12
3. Kelompok Sadar Wisata.....	13
4. Desa Wisata.....	17
G. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	20
H. METODE PENELITIAN.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Unit Analisis.....	21

3. Teknik Pengumpulan data .....	23
4. Teknik Analisis Data .....	25

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN WIDODOMARTANI DAN PROFIL POKDARWIS. ....27**

A. SEJARAH KALURAHAN WIDODOMARTANI.....	27
B. KEADAAN GEOGRAFIS.....	28
C. KEADAAN DEMOGRAFIS. ....	32
D. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA.....	37
E. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH. ....	39
F. PROFIL KELOMPOK SADAR WISATA BLUE LAGOON.....	40

## **BAB III**

### **ANALISIS RELASI PEMERINTAH DESA DAN POKDARWIS DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA BLUE LAGOON**

A. Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam Mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon.....	47
1. Hubungan Pemerintah Desa dan Pokdarwis Dalam Mengembangkan objek wisata Blue Lagoon. ....	47
2. Pengaruh Relasi Kekuasaan Pengembangan objek wisata Blue Lagoon.....	57

## **BAB IV**

### **PERSPEKTIF PEMERINTAHAN. ....62**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran. ....	64
Daftar Pustaka. ....	65

#### Lampiran-Lampiran

- Pedoman Wawancara
- Surat Izin Penelitian dari Kampus STPMD "APMD"
- Surat Balasan dari Kalurahan Widodomartani
- Lampiran Dokumentasi Wawancara

- Kendali Bimbingan Skripsi

### Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel I.1	Deskripsi Informan	19
Tabel II.1	Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Widodomartani	26
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	28
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	30
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	31
Tabel II.5	Sarana dan Prasarana Keagamaan	32
Tabel II.6	Sarana dan Prasarana Pendidikan	32
Tabel II.7	Sarana dan Prasarana Kesehatan	33
Tabel II.8	Sarana dan Prasarana Olahraga	33
Tabel II.9	Struktur Organisasi BPK Kalurahan Widodomartani	38

### Daftar Gambar

No	Judul Gambar	Halaman
Gambar II.I	Peta Kalurahan Widodomartani	25

### Daftar Bagan

No	Judul Bagan	Halaman
----	-------------	---------

<b>Bagan II.1</b>	<b>Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kalurahan Widodomartani</b>	<b>36</b>
<b>Bagan II.2</b>	<b>Struktur Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon</b>	<b>41</b>

## INTISARI

Penelitian yang bertajuk Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam Mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena antara Pemerintah kalurahan dan Pokdarwis minim relasi selama ini, padahal Pemerintahan Kalurahan merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan potensi Kalurahan namun, nampak Pokdarwis minim melibatkan atau memberikan ruang kepada Pemerintah Kalurahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaiman Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian ini berada di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Objek Penelitian ini adalah Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak , Kabupaten Sleman. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan. **Pertama**, inisiasi gagasan ide awal pendirian Desa Wisata Blue Lagoon sepenuhnya berasal dari warga masyarakat dusun dalem, Pemerintah Kalurahan hanya tamu yang diundang dalam peresmian Desa Wisata Blue Lagoon. Relasi diantara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis hanya sebatas pendampingan administrasi karena Desa Wisata Blue Lagoon pengelolaannya masih dikelola secara mandiri oleh Pokdarwis. Selama Blue Lagoon berdiri sampai saat ini tidak ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis, serta dari pihak Kalurahan hanya sebatas memberikan pendampingan struktural kepada Pokdarwis, maupun pendampingan yang berhubungan dengan dana. **Kedua**, pengelolaan wisata Blue Lagoon ini yang dilakukan oleh Pokdarwis nampak meniadakan Pemerintah Kalurahan. Dengan narasi-narasi yang disampaikan pengelola, lebih cenderung menutup diri untuk berkolaborasi dengan

Pemerintah Kalurahan. Bahwa dari pihak Pemerintah Kalurahan memiliki kesadaran mengenai lemahnya relasi antara Kalurahan dan Pokdarwis sehingga Kalurahan berencana dan sedang diproses untuk memasukan Desa Wisata Blue Lagoon kedalam BUMDesa. Harapannya dengan dimasukan Desa Wisata Blue Lagoon kedalam BUMDesa, Pemerintah Kalurahan dapat merangkul wisata Blue Lagoon dan menarik bantuan dana yang akan dikelola oleh Pokdarwis sebagai pengelola utama.

**Kata Kunci : Relasi, Blue Lagoon, Pokdarwis.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang dimaksud dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa berkewenangan untuk mengurus dan mengelola Desanya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mendorong adanya kemandirian Desa, maka secara otomatis dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas tersebut, Desa memiliki wewenang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun dalam pengelolaan keuangan dan Pemerintah Desa sebagai penyelenggaranya.

Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memenuhi semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik. Di antaranya wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu

kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Desa wisata itu seluruhnya terintegrasi, semua unsur di dalam desa untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal sebagai pariwisata.

Padukuhan Dalem Kalurahan Widodomartani terletak di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dan memiliki sumber potensi berupa desa wisata bertemakan wisata air. Desa wisata Blue Lagoon telah diresmikan sejak bulan Maret 2015 dan terus berkembang sebagai salah satu tujuan wisata alam di wilayah Kabupaten Sleman. Desa Wisata dan Budaya Blue Lagoon (Tirta Budi) yang dikenal dengan Pemandian mata air alami dan melestarikan budaya kearifan lokal yang masih melekat seperti Merti sumber, kenduri, batik, tari-tarian, serta yang dikelola oleh warga setempat sendiri dengan baik. Perkembangan desa wisata Blue Lagoon ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemandirian penduduk lokal dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat hingga saat ini.

Keberadaannya yang masih terhitung baru ternyata sudah memberikan dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Desa wisata Blue Lagoon dikelola oleh kelompok pengelola atau yang dikenal dengan kelompok sadar wisata ( POKDARWIS ) yang keseluruhannya merupakan warga Dusun Dalem. Berawal dari keinginan menyetarakan kesejahteraan masyarakat dusun, kelompok sadar wisata ( POKDARWIS ) kemudian membuat kebijakan bahwa hanya masyarakat yang kurang mampu yang boleh ikut berpartisipasi di desa wisata Blue Lagoon.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggara urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia''. Pada umumnya Pemerintah Desa tentunya menjalin relasi atau hubungan kerja sama dengan Pokdarwis dalam pembangunan maupun pengembangan Desa Wisata yang ada di Desa, seperti salah satunya bantuan berupa suntikan dana. Namun yang terjadi di Blue lagoon Pemerintah Kalurahan tidak memberikan bantuan suntikan dana kepada Pokdarwis untuk pembangunan, dan fasilitas - fasilitas Blue Lagoon ini, dan berdasarkan hasil observasi yang ada di lapangan menemukan bahwa antara Pokdarwis dan Pemerintah Kalurahan terjadi minim Relasi yang terjalin selama ini. Antara Pokdarwis dan Pemerintah Kalurahan hanya sebatas warga masyarakat yang melaksanakan Desa Wisata secara swadaya masyarakat, dan kerja sama hanya sebatas perijinan.s

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue lagoon di Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngeplak Kabupaten Sleman."

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam Mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon Di Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngeplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.



## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan pada kajian ilmu pemerintahan mengenai kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa wisata dalam mengembangkan wisata lokal.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Pemerintah Desa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa Widodomartani agar mampu meningkatkan kapasitas dan memberikan pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat agar lebih baik dalam mengembangkan Desa Wisata.

## **E. LITERATUR REVIEW**

Bagian ini berisikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata. Penelitian yang dilakukan memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Armela Shintani (2020), meneliti tentang Relasi Pemerintah Daerah dan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata di Sei Gohong. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemerintah lokal, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola Sei Gohong. Hal tersebut dapat dilihat dari interaksi tiga pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai fasilitator, hal yang belum terpenuhi dalam penyediaan layanan oleh pemerintah di lengkapi oleh sektor swasta sebagai penyedia dan penyelenggaraan layanan

pariwisata yaitu akomodasi (*villa*) dan komunikasi kawasan wisata berpartisipasi untuk mengembangkan pariwisata oleh pokdarwis, akan tetapi manajemen tujuan wisata ini hanya melibatkan pemerintah lokal melalui departemen pariwisata, kebudayaan, dan pemuda Kota Palangkaraya bersama dengan masyarakat melalui pokdarwis yang terlibat langsung dalam manajemen pariwisata Sei Gohong. (Sumber: *JISPAR, jurnal ilmu sosial, politik dan pemerintahan*, 9 (2), 28-37 Pada 12 Maret 2022)

Kajian selanjutnya adalah terhadap penelitian yang dilakukan oleh Dona Fauziah (2017). Penelitian tersebut meneliti tentang ekonomi politik: relasi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kasus pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah lokal dan masyarakat dilihat dari hubungan antara otoritas dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan finansial pada aktivitas tambang emas ilegal. Otoritas dan pengusaha aktor utama dalam kegiatan tambang emas ilegal dan melibatkan sejumlah tokoh publik yang dianggap mampu memberikan kenyamanan kepada pengusaha. Dampak hubungan yang terjadi sangat banyak negatif dari positif, penambangan ilegal sangat merusak lingkungan, budaya tatanan sosial, dan juga pemerintah setempat. (Sumber: *jom fisip*, vol.4, No.1, 1-15 Pada: 12 Maret 2022)

Kajian berikutnya dilakukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh A. Ummu Kaltsum (2018), dengan fokus penelitian yaitu terkait politik tata ruang (relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Gowa). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD mendukung atau menerima

pengembangan untuk berinvestasi di Kabupaten Gowa terlebih untuk penerbitan. Namun, disisi lain masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah cenderung dipersulit oleh pemerintah dan dalam masalah ini tidak ada bentuk pengawasan atau tindak lanjut dari DPRD. (*Sumber:skripsi.UIN Alaudin.Makassar Pada:12 Maret 2022*)

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Chaerul Imam (2017), meneliti tentang relasi intraorgansasi pemerintah kota Batu dalam pengelolaan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat saling cari informasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah Kota Batu. (*Sumber:Skripsi.Universitas Brawijaya,Malang Pada:12 Maret 2022*)

Kajian terakhir dilakukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Nisbatin (2018). Penelitian tersebut meneliti tentang relasi sosial pedagang dalam pemanfaatan hutan sebagai wana wisata (studi kasus pedagang warungan di hutan Jati Goa Terawang di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses masyarakat sekitar hutan sangat terbuka dalam memanfaatkan keberadaan hutan. Pihak perhutani memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk bertani maupun berdagang di kawasan hutan jati Goa Terawang. Aktivitas berdagang menciptakan bentuk-bentuk relasi sosial diantara pedagang warungan. Relasi sosial tersebut bersifat sinergi dan oposisi. Relasi sosial sinergi ditunjukkan dengan adanya kerjasama, sedangkan relasi sosial oposisi ditunjukkan dengan adanya persaingan. (*Sumber:jurnal soladiraty Unnes 7 (2) Pada 12 Maret 2022*)

## **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. RELASI**

#### **Relasi Kuasa**

Relasi atau biasa disebut hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain ( Tams Jayakusuma 2001:25). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan berasal dari kata hubung yang artinya bersambung atau berangkaian yang suatu dengan yang lain. Jadi hubungan atau relasi adalah suatu proses yang terjadi diantara dua objek atau lebih, baik itu orang atau organisasi yang saling berhubungan dan saling berpengaruh yang akan memberikan dampak terhadap objek tersebut.

Max Weber mendefinisikan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu (dalam Jeanne, 2013: 66). Weber juga menghubungkan berbagai macam sumber kekuasaan karena menurutnya kekuasaan memiliki alasan atau sumber, itulah sebabnya mengapa Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas dibandingkan kekuasaan. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang lain bertindak sesuai kehendaknya (dalam Rafael, 2001: 190).

Weber juga mengemukakan bahwa ada wewenang yang menyangkut hubungan kekuasaan. Menurut Weber (dalam Hotman Sihan, 1986 : 21) wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Jadi menurut Weber kekuasaan itu bersifat mengikat yang disebabkan oleh pihak penguasa memiliki sumber dalam memperoleh kekuasaan dan kekuasaan tersebut bersifat memaksa. Weber menekankan tentang relasi kekuasaan yang berbicara antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai.

Weber juga mengungkapkan bahwa ada tiga bentuk kekuasaan yaitu pertama, kekuasaan tradisional yang bersumber dari tradisi masyarakat yang masih memegang bentuk kerajaan atau kasta. Kedua, kekuasaan kharismatik yang bersumber dari pengakuan terhadap kualitas yang dimiliki oleh penguasa dan yang ketiga kekuasaan rasional-legal, kekuasaan ini berlandaskan sistem yang berlaku melalui peraturan atau perundang-undangan serta ada batasan wewenang yang dimiliki oleh pejabatnya.

Pengertian umum kekuasaan Weber berbanding terbalik dengan paham Michel Foucault. Kekuasaan bagi Foucault (dalam Umar Kamahi, 2017 : 118) tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah, kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk Negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu Kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif, singkatnya

kekuasaan menurut Foucault adalah kekuasaan yang sifatnya positif dan tidak mendominasi, kekuasaan menurut Foucault tidak berbicara tentang siapa menguasai siapa berbanding terbalik dengan pengertian kekuasaan menurut paham Marx dan Weber yang menekankan kekuasaan sebagai bentuk dominasi seperti kekuasaan yang dimiliki oleh Raja terhadap rakyatnya. Kekuasaan menurut paham Marx dan Weber dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (*sovereignty*) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seseorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (*legitimate*) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus.

Menurut Foucault (1980:139) kekuasaan merupakan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan ilmu pengetahuan merupakan kekuasaan itu sendiri. Sehingga kekuasaan selalu muncul di waktu dan tempat tertentu, untuk menyimpulkannya, direkonstruksi asal usulnya serta dilakukannya analisis hubungan kekuasaan (Ketut Wiradnyana, 2018: 59). Jadi kekuasaan berada dimana-mana dan tercipta dari sebuah relasi dan momen, seperti yang diungkapkan oleh Foucault (dalam Ketut Wiradnyana, 2018 : 61) kekuasaan bukan suatu institusi, bukan struktur, bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki, tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis dan kompleks dalam suatu masyarakat.

Kekuasaan juga menurut Foucault (dalam Nyoman Wijaya, 2012 : 142) tidak mencerminkan kelas (borjuis) atau elit penguasa maupun atribut-atributnya,

melainkan strategi yang diakibatkan oleh fungsi (disposisi, manuver, taktik dan teknik). Kekuasaan bukan berasal dari ekonomi ataupun politik tetapi tercipta dari setiap hubungan atau relasi.

Foucault dalam esainya membedakan antara kepengaturan dan kekuasaan mutlak. Kepengaturan menurut Foucault (dalam Tania Murray Li, 2012 : 24) adalah jenis kekuasaan yang harus dibangun diatas kemampuan menjalankan amanat untuk mensejahterakan orang banyak. Kepengurusan adalah bentuk kekuasaan secara halus, mengendalikan orang tanpa orang itu merasa sedang dikendalikan. Sedangkan kekuasaan mutlak bersifat melingkar, sebagai contoh kekuasaan seorang raja.

Menurut Soerjono Soekanto (1983) menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang meliputi :

#### 1. Rasa Takut

Perasaan takut akan menimbulkan suatu kepatuhan kepada orang yang ditakuti. Perasaan takut bersifat negatif karena orang menuruti pihak yang berkuasa dalam keadaan terpaksa. Secara tidak langsung orang yang takut tersebut akan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya.

## 2. Rasa Cinta

Rasa cinta memunculkan kekuasaan yang bersifat positif. Orang-orang bertindak atas dasar kemauan sendiri dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Dari keadaan ini maka sistem relasi kekuasaan dapat berjalan secara baik dan teratur.

## 3. Rasa Kepercayaan

Kepercayaan timbul sebagai hasil hubungan dari dua orang atau lebih, dalam hal ini pemegang kekuasaan mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak yang dikuasai karena sesuai dengan peranan yang dilakukannya, dengan demikian orang-orang akan bertindak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penguasa.

## 4. Pemujaan

Sistem ini akan membuat orang atau bahkan kelompok selalu membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa.

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi. Kekuasaan dapat berhubungan dengan instansi, jabatan, kharisma (Weber) dan pengetahuan (Foucault). Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas dan kewenangan untuk bertindak. Kekuasaan dalam hal ini merujuk pada kewenangan atau hak yang diperoleh oleh aktor untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.



Jadi peneliti menyimpulkan bahwa relasi kekuasaan adalah hubungan yang terjalin antara dua atau lebih orang atau instansi yang saling mempengaruhi dan dari hubungan tersebut dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat positif dan juga bersifat negatif atau dominasi. Jadi relasi kekuasaan dapat bersifat Top-Down (Weber) atau bersifat horizontal (Foucault). Bentuk lain dari kekuasaan akan melahirkan suatu kewenangan.

## **2. PEMERINTAH DESA**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) Tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “ penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’’. Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintahan Desa yaitu kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu;

- Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah Desa dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu pemerintahan Desa Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun yang menjadi kewenangan yang dijalankan pemerintah Desa pemerintahan Desa meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **3. KELOMPOK SADAR WISATA ( POKDARWIS )**

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa mereka serta mewujudkan Sapta PesonaKepariwisataan ini diharapkan bakal meningkatkan pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan adanya Pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan daerah wisatanya. Sehingga bukan hanya Pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri. Maksud dari pembentukan Pokdarwis yaitu mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Fungsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah:

- 1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
- 2) Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada hakekatnya adalah kegiatan pembangunan pariwisata sama seperti pembangunan di sektor lain. Diperlukan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran dan fungsi yang penting adalah

masyarakat. Masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya berperan sebagai tuan rumah (host), namun juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelompok swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi yang penting dalam pengembangan pariwisata diantaranya:

1. Sebagai subyek atau pelaku pembangunan Sebagai subyek atau pelaku pembangunan, yaitu masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan memiliki peran dengan terkait linknya baik dari pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk bersama- sama mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya.

2. Sebagai penerima manfaat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya Kelompok Sadar Wisata diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peningkatan perekonomian mereka.

3. Sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif

Salah satu aspek mendasar dalam keberhasilan membangun kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah (host) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif. Dengan terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif diharapkan wisatawan akan merasa nyaman dan tidak bosan untuk berkunjung ke tempat pariwisata tersebut.

4. Mewujudkan Sapta Pesona dalam masyarakat Sapta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Unsur sapta pesona meliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya langkah dan juga upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten. Sehingga Kelompok Sadar Wisata sebagai salah satu penggerak dalam masyarakat memiliki peran dalam mewujudkan Sapta Pesona tersebut. Terciptanya Sapta Pesona tersebut tentu akan memberi dampak positif bagi tempat wisata tersebut karena dapat menambah daya tarik wisatawan sehingga secara tidak langsung akan dapat meningkat jumlah wisatawan yang datang.

#### **4. DESA WISATA**

Pariwisata merupakan sebuah komoditas ekonomi baru yang mulai dikembangkan. Dalam teori ekonomi yang lebih umum, keunggulan dari kompetisi pariwisata dinilai dari sisi permintaan. Seperti misalnya, wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi disebabkan oleh pendapatan orang, populasi negara wisatawan, biaya hidup, biaya transportasi kedua negara, nilai tukar, dan inflasi. Untuk memiliki keunggulan komparatif, pariwisata harus mengubah segi pembangunan dari sisi permintaan ke penawaran. Destinasi wisata kerap dikunjungi dikarenakan kondisi lingkungan, infrastruktur, dan nilai budaya Murphy (dalam Tjahjadi Michael Dkk 2016). Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo mengacu pada keunggulan yang dimiliki setiap daerah atau negara. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa apabila dua negara melakukan perdagangan suatu komoditi yang bagi negara tersebut merupakan keunggulan komparatif karena negara tersebut berspesialisasi pada suatu komoditi, maka negara-negara tersebut akan mendapatkan keuntungan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keunggulan komparatif adalah dengan mengembangkan desa wisata. Menurut Nuryanti (Dalam Yuliati & Suwandono, 2016) desa wisata merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata. Desa wisata adalah bentuk industri pariwisata yang berupa kegiatan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk dari

desa wisata tersebut atau melakukan perjalanan wisata ke desa wisata. Unsur produk pariwisata terdiri dari angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata.

Desa wisata adalah sebuah wujud kombinasi antara akomodasi, atraksi, dan sarana pendukung yang dikenalkan dalam sebuah tata kehidupan masyarakat yang menjadi satu dengan aturan dan tradisi yang berlaku . Sebuah desa bisa disebut desa wisata ialah desa yang mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan, sebuah tradisi, dan kebudayaan yang menjadi ciri khas, aksesibilitas dan sarana prasarana yang mendukung program desa wisata, keamanan yang terjamin, terjaganya ketertiban, dan kebersihan. Dasar dalam pengembangan desa wisata ialah pemahaman tentang karakter dan kemampuan elemen yang ada dalam desa, seperti: kondisi lingkungan dan alam, sosial budaya, ekonomi masyarakat, struktur tata letak, aspek historis, budaya masyarakat dan bangunan, termasuk indigeneus knowledge (pengetahuan dan kemampuan lokal) yang dimiliki masyarakat.

Dalam proses pengembangan desa wisata, masyarakat sekitar dijadikan sebagai subyek aktif, artinya lingkungan sekitar dan kehidupan sosial masyarakat di desa tersebut dijadikan sebagai tujuan wisata. Masyarakat juga berperan sebagai agen promosi wisata serta inovator dalam memberikan ide gagasan pengembangan desa wisata. Menurut I. Pitana (dalam N. Nurhajati 2017 ), pembangunan dan pengembangan pariwisata secara langsung akan merambah dan mengikutsertakan masyarakat, sehingga dapat memberikan berbagai pengaruh kepada masyarakat setempat, baik berupa pengaruh positif maupun negatif.

Pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar desa wisata yang diorganisir secara maksimal, akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hasil yang diperoleh dari kegiatan desa wisata akan dikembalikan kepada masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, konsep desa wisata akan menjadikan suatu desa menjaga kelestarian alam dan lingkungan, budaya, serta tradisi desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengembangan desa wisata juga sebagai kegiatan pemberdaya guna masyarakat dalam membangun desa secara bersama-sama. Motivasi desentralisasi memberikan kebebasan bagi warga untuk mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya merupakan metode untuk menciptakan pariwisata yang berbasis kelompok sosial masyarakat. Raharjana (Dalam Yusuf A.Hilman Dkk 2018). Tujuan dari pengembangan desa wisata adalah untuk melestarikan lingkungan alam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga dengan mengimplementasikan konsep desa wisata ini menjadi salah satu wujud pariwisata yang ramah terhadap lingkungan di waktu mendatang (Juwita dalam Theofilus Retmana P , 2013). Pengembangan desa wisata erat kaitannya dengan industri pariwisata. Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. menurut R.S Darmajadi (Dalam Christina & Putri, 2014) tentang industri pariwisata adalah merupakan sekumpulan dari berbagai jenis bidang usaha, yang secara bersama memproduksi



produk ataupun jasa-jasa atau layanan, baik secara langsung maupun akan diperlukan oleh wisatawan saat melakukan kunjungannya.

## **G. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup dalam penelitian tentang Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon, dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu meliputi:

1. Hubungan Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Objek Wisata Blue Lagoon.
2. Pengaruh relasi kekuasaan pengembangan Objek Wisata Blue Lagoon.

## **H. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012). Menurut Arikunto (2019, hlm.136) metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon Di Kalurahan Widodomartani adalah jenis Penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi

terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam (Arikuto,2002).

Sedangkan dasar peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif adalah peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon di Kalurahan Widodomartani. Pendekatan Kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J, 2018).

## **2. Unit analisis**

### **a. Lokasi penelitian**

Lokasi yang diambil penulis dalam melakukan penelitian adalah Desa Wisata Blue Lagoon beralamat di Dusun. Dalem , Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman , Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **b. Objek penelitian**

Menurut (Sugiono 2017:4-5). “ Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal”.

Objek dalam penelitian ini adalah Relasi Pemerintah Desa dan pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon.

c. Subyek penelitian

Didalam penelitian ini Unit Analisis penentu informan menggunakan metode purposive. Purposive menurut Sugiyono (dalam Prasetyo, 2014:198) adalah suatu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti sendiri. Dengan teknik purposive, narasumber dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Widodomartani, Pokdarwis, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Dukuh Dalem dan masyarakat Dalem. Narasumber tersebut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menjawab masalah penelitian.

Dalam penelitian ini informan yang menjadi narasumber bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel I.I**  
**Deskripsi informan**

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Heruyono	S1	Lurah Widodomartani
2.	Taufiq Wahyu Widodo	S1	Carik Widodomartani
3.	Kalpika Nengsih	S1	BPK Widodomartani
4.	Kismadi	SMA	Dukuh Dalem
5.	Suhadi	SMK	Ketua Pokdarwis
6	Sri Rahayu	SMA	Mantan Dukuh Dalem
7.	Edi	SMA	Travel Rental, Mantan Pegawai Pokdarwis
8.	Hartanto	SMA	Tukang Parkir Warung Makan, Mantan Pegawai Pokdarwis

Sumber : Data Primer Penelitian, 2022

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut ini :

#### **a. Observasi**

Natusion,1988 (dalam Sugiono, 2017:309) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program dilokasi penelitian. Hal ini sangat penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Pengamatan ini dilakukan penulis dengan menggunakan indra mata untuk melihat apa yang terjadi sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh data observasi yang berupa data faktual, cermat dan terperinci sesuai dengan keadaan dan konteks kegiatan yang terjadi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Blue Lagoon di Kalurahan Widodomartani.

#### **b. Wawancara**

Menurut Moleong teknik wawancara adalah sebagai berikut:

"Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan yang dilakukan dengan maksud tertentu.

Maksud tertentu dalam hal ini adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin data yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian" (Moleong,2014: 200)

Dalam penelitian ini sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara, kemudian wawancara dilakukan peneliti dengan turun langsung ke lokasi penelitian bertemu informan yang sudah di tentukan dan melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

pengumpulan data melakukan dokumentasi adalah sebagai berikut:

“Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang misalnya bisa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan” (Sugiono 2017: 329).

Pada saat penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mencari beberapa data sekunder yang terkait dengan penelitan Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon.

Data yang diperoleh dapat berupa tulisan, rekaman, foto, dokumen, dan video yang berkaitan dengan Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon di Kelurahan Widodomartani, Kapenewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dan pengumpulan data menggunakan bantuan peralatan seperti alat tulis, rekaman dan camera.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut (Sugiono 2017:335) menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun bagian data ke dalam kategori, menjabarkan ke bagian terkecil, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan dapat dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri-sendiri ataupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah dalam analisis sebagai berikut :

a) Pengumpulan data

Pada tahap ini data di perlukan untuk kepentingan penelitian di ambil di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen.

b) Reduksi data

Tahap reduksi data merupakan suatu proses dimana data diperoleh dari lapangan tersebut dilakukan reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan dilakukan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan.

c) Penyajian data

Penyajian data atau display data merupakan tampilan atau laporan informasi sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif.

d) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dan rumusan pertanyaan penelitian yang dicari selama proses penelitian.

**BAB II**

**PROFIL KALURAHAN WIDODOMARTANI DAN PROFIL**

**POKDARWIS**

**A. Sejarah Kalurahan Widodomartani**

Sejarah mengenai Kalurahan Widodomartani berawal dari dua kata yaitu Widodo berarti Selamat/Bagus dan Martani berarti pertanian, jadi kalau digabungkan pengertiannya adalah Kalurahan yang baik untuk pertanian. Kalurahan Widodomartani terbentuk berdasarkan maklumat Sri Sultan HB IX pada tahun 1946 yang selanjutnya pada tahun 1951 mulai dibentuk Kalurahan Widodomartani yang merupakan gabungan dari tiga Kalurahan yaitu, Kalurahan Jeruksari, Kalurahan Dukuhsari, Kalurahan Kentisari.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kalurahan Widodomartani bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan telah menetapkan Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hari jadi Kalurahan Widodomartani yaitu pada tanggal 19 april. Oleh karena itu pada masa yang akan datang setiap tanggal tersebut, diperingati sebagai hari jadi Kalurahan Widodomartani.

Karena terbentuknya Kalurahan Widodomartani saat itu perangkat Kalurahan hanya terdiri dari :

- a. Lurah : Kepala Daerah
- b. Carik : Bagian Umum
- c. Modin : Urusan Agama
- d. Kesejahteraan
- e. Keamanan



#### f. Sosial

selanjutnya Lurah yang pernah memimpin yakni :

- a. Tahun 1951-1990 dipimpin oleh Bapak Purwo Widodo (39 Tahun)
- b. Tahun 1990-1990 dipimpin oleh Bapak Suharjo (1 Tahun)
- c. Tahun 1991-1998 dipimpin oleh Bapak Lamjai (7 Tahun)
- d. Tahun 2001-2013 dipimpin oleh Bapak Tony Suryanto (12 Tahun)
- e. Tahun 2014- sekarang dipimpin oleh Bapak Heruyono,ST (8 Tahun)

sehingga dari awal terbentuknya Kalurahan Widodomartani, Kalurahan ini baru dipimpin oleh 5 orang Lurah. Berdasarkan sejarah Kalurahan Widodomartani diatas dapat disimpulkan bahwa masa kepemimpinan Lurah Widodomartani yang paling lama adalah Bapak Purwo Widodo selama 39 tahun. Bapak Purwo Widodo bisa menjabat selama 39 tahun dikarena pada saat tahun-tahun beliau menjabat belum ada ketentuan atau aturan dari Pemerintah Pusat terkait masa jabatan seorang Lurah Kalurahan. Namun dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kini masa jabatan seorang Kepala Desa sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan struktur Organisasi dan tata kerja pemerintahan kalurahan (SOTK) terbaru saat ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2016 tentang pedoman SOTK.

#### **B. Keadaan Geografis**

Kalurahan Widodomartani merupakan Kalurahan di Wilayah Kabupaten Sleman yang berlokasi di ibu Kota Kapanewon Ngemplak, dengan luas wilayah Kalurahan Widodomartani kurang lebih 615Ha. Jarak ke Ibu Kota Kapanewon kurang lebih 100m, sedangkan jarak antara pusat Pemerintahan Kalurahan

Widodomartani dengan Ibu Kota Kabupaten Sleman berjarak kurang lebih 15 km, jarak tempuh antara pusat Pemerintahan Kalurahan Widodomartani ke Ibu Kota Provinsi kurang lebih 20 km, dan jarak tempuh antara pusat Pemerintahan Kalurahan Widodomartani ke Ibu Kota Negara kurang lebih 650km. Wilayah Kalurahan Widodomartani berbatasan langsung dengan Kalurahan-Kalurahan di Kapanewon Ngemplak. Adapun batas-batas Kalurahan Widodomartani adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kalurahan Wukirsari
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kalurahan Selomartani
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kalurahan Umbulmartani
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kalurahan Bimomartanis

Kalurahan Widodomartani memiliki dua jenis tanah yaitu tanah sawah atau tanah basah dan tanah kering yang dijadikan sebagai lahan kebun dan pemukiman warga. Dari kedua jenis lahan tersebut sebagian besar digunakan oleh masyarakat untuk berkebun dan bertani. Lahan perkebunan lebih banyak ditanami tanaman-tanaman seperti singkong, jagung, ubi jalar, sayur-sayuran, cabai, bawang, kunyit dan beberapa tanaman lainnya yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Kemudian, lahan yang digunakan untuk pemukiman cukup luas, karena jumlah jiwa yang ada di Kalurahan Widodomartani cukup banyak yakni 10.176 jiwa.

## Gambar II.I

### Peta Kalurahan Widodomartani



(Sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani, 2022)

#### 1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Kalurahan Widodomartani terdiri dari 19 Padukuhan, 31 Rukun Warga, dan 73 Rukun Tetangga. Berikut merupakan tabel daftar 19 padukuhan yang ada di Kalurahan Widodomartani beserta jumlah RT dan RW. Berikut gambar pembagian wilayah administratif Kalurahan Widodomartani, Sleman :

**Tabel II.I****Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Widodomartani**

No	Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW	Nama Dukuh
1.	Blambangan	4	2	Suryanto
2.	Kalijeruk 1	3	1	Drs. Yuniawan Eko Putro
3.	Kalijeruk 2	3	1	Tri Handoko
4.	Ganjuram	2	1	Deni Dwi Harjanto
5.	Klancingan	2	1	Wahadi
6.	Jimat	2	1	Tri Hartono
7.	Jangkang	2	1	Saryadi
8.	Dalem	4	2	Kismadi
9.	Jetis	6	2	Haryono
10.	Banglen	3	1	Sumadiyono
11.	Kabunan	4	2	Kulup Jaka Umbaran
12.	Kemasan	4	2	Lingga Gupita
13.	Karang	4	2	Suharsono
14.	Ngalian	4	2	Sri Yulianti
15.	Kwadungan	4	2	Nanang Sujatmiko
16.	Karanganyar	2	1	Joko Wiratno SH,MH
17.	Pucangan	8	3	Amanda Pungky
18.	Pondok 1	5	2	Priangga Arda Priguna
19.	Pondok 2	7	2	Suhamto
	<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	

### **C. Keadaan Demografis**

Sampai dengan tahun 2022 Kalurahan Widodomartani memiliki penduduk sebanyak 10.176 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 4.933 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 4.928 jiwa yang terbagi dalam 3.665 Kepala Keluarga (KK). Penduduk Kalurahan Widodomartani tersebar di Wilayah Kalurahan Widodomartani yang terbagi dalam 19 Dusun, 73 Rukun Tetangga, 31 Rukun Warga.

Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kalurahan Widodomartani didominasi oleh laki-laki.

#### **1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel II.2****Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang/Jiwa)
1.	Dibawah 1 tahun	2	5	7
2.	2 s/d 4 Tahun	129	108	237
3.	5s/d 9 Tahun	322	291	614
4.	10 s/d 14 Tahun	372	324	697
5.	15 s/d 19 Tahun	357	317	676
6.	20 s/d 24 Tahun	359	351	713
7.	25 s/d 29 Tahun	329	295	630
8.	30 s/d 34 Tahun	288	304	597
9.	35 s/d 39 Tahun	326	349	675
10.	40 s/d 44 Tahun	366	371	741
11.	45 s/d 49 Tahun	391	367	759
12.	50 s/d 54 Tahun	349	364	716
13.	55 s/d 59 Tahun	300	304	604
14.	60 s/d 64 Tahun	254	259	516
15.	65 s/d 69 Tahun	178	231	411
16.	70 s/d 74 Tahun	171	176	348
17.	Diatas 75 Tahun	441	516	963
	<b>Jumlah</b>	4.933	4.928	10.176

(Sumber : Website Kalurahan Widodomartani, 2022)

Berdasarkan Tabel II.2 di atas penduduk Desa Widodomartani termasuk ke dalam mayoritas usia penduduk muda (expansive ) ditandai dengan sebagian besar

penduduk berada diusia muda sehingga dapat dikatakan pertumbuhan penduduk di Kalurahan Widodomartani masih cukup tinggi.

## **2. Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan, berikut agama yang dianut oleh warga Desa Widodomartani dan jumlah penganutnya yaitu:

- a) Islam : 9.594 Orang
- b) Kristen : 76 Orang
- c) Katolik : 195 Orang
- d) Budha : 1 Orang

Dapat dilihat data diatas menunjukkan bahwa penduduk di Kalurahan Widodomartani mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk 9.594 jiwa.

## **3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia untuk hidup dengan layak. Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data masyarakat Desa Widodomartani berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.3**

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang/jiwa)
1.	Belum atau tidak sekolah	2.388
2.	Belum tamat SD	898
3.	Tamat SD	788
4.	Tamat SLTP	1.336
5.	Tamat SLTA	3.225
6.	Diploma I/II	72
7.	Akademi/Diploma III/S.Muda	272
8.	Diploma IV/Strata I	713
9.	Strata II	52
10	Strata III	5
	<b>Total</b>	<b>10.176</b>

(Sumber : Website Kalurahan Widodomartani, 2022)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat pendidikan di Kalurahan Widodomartani masih sangat rendah terbukti dengan jumlah warga yang tidak sekolah dan warga yang tidak tamat SD sangatlah banyak. Warga yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD jumlahnya mencapai 3.286 orang, sedangkan warga yang tingkat pendidikannya SD berjumlah 788 orang. Jika kita menggabungkan warga yang tidak sekolah dengan yang belum tamat SD dan yang tamat SD jumlahnya adalah 4.074 orang berbanding jauh dengan warga yang tamat SLTP, SLTA dan perguruan tinggi yang jika digabungkan hanya sebanyak orang.



#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Mata pencaharian utama masyarakat di Desa Widodomartani sebagian besar berada di sektor Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat selain sektor pertanian, peternakan juga masih memiliki peranan penting bagi masyarakat Desa Widodomartani. Data Penduduk Desa Widodomartani berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel II.4**

#### **Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah (orang/jiwa)
1.	Belum atau tidak bekerja	1.570
2.	Pensiunan	312
3.	Mengurus Rumah Tangga	1.313
4.	Pelajar/mahasiswa	1.804
5.	Pegawai Negeri Sipil	239
6.	TNI/Polri	96
7.	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	378
8.	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	2.067
9.	Karyawan BUMN/BUMD	32
10.	Karyawan Swasta	1.317
11.	Wiraswasta	772
12.	Tenaga medis	23
13.	Pekerjaan lain	38
	<b>Jumlah</b>	<b>10.176</b>

(Sumber : Website Kalurahan Widodomartani, 2022)

## D. Keadaan Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Tabel II.5

#### Sarana dan Prasarana Keagamaan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	22
2.	Mushola	11
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>

(sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani,2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana dan prasarana keagamaan yang berada di Kalurahan Widodomartani sangat didominasi oleh Masjid dan Mushola yang diperuntukan untuk penduduk yang beragama Islam. Hal ini tentu saja sesuai dengan jumlah penduduk di Kalurahan Widodomartani yang mayoritasnya beragama Islam.

### 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel II.6

#### Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung SD/Sederajat	4
2.	Gedung SMP/Sederajat	1
3.	Gedung SMA/Sederajat	1
4.	Taman Bacaan	1
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

(sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani,2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jenis fasilitas pendidikan Kalurahan Widodomartani mempunyai prasarana pendidikan yang

cukup lengkap dengan fasilitas juga yang lengkap untuk pendidikan dari SD, SMP, SMA dan dilengkapi dengan Taman Bacaan.

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

**Tabel II.7**

#### **Sarana dan Prasarana Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Posyandu	21
2.	Puskesmas	1
3.	Rumah Sakit	1
	<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

(Sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah sarana prasarana kesehatan di Kalurahan Widodomartani cukup lengkap dengan adanya RS. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap tentunya dapat menanggapi jika sewaktu-waktu masyarakat memerlukan penanganan yang bersifat urgen. Disatu sisi meskipun sarana kesehatan telah tersedia namun jika tidak adanya tenaga kesehatan maka sarana kesehatan pun tidak dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya.

### 4. Sarana dan Prasarana Olahraga

**Tabel II.8**

#### **Sarana dan Prasarana Olahraga**

<b>No</b>	<b>Sarana Olahraga</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Lapangan Sepak Bola	1
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

( Sumber : Monografi Dinding Kalurahan Widodomartani,2022)

Kebutuhan akan olahraga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia begitupun dengan masyarakat Kalurahan Widodomartani. Namun dari sarana olahraga yang ada, sangat minim sekali untuk fasilitas olahraga.

#### **E. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Widodomartani**

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sebagaimana dipaparkan dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan yang memiliki peranan dalam tata kelola desa yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Dalam tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dipenyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan. Pamong desa atau perangkat desa adalah pembantu kepala desa yang meliputi sekretaris desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administratif pemerintahan desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan keuangan, urusan perencanaan dan urusan tata usaha dan umum. Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Sedangkan untuk pelaksana kewilayahan dibagi menjadi 19 kewilayahan yang

dipimpin oleh 19 kepala dusun. Hal ini dapat dilihat dari struktur susunan organisasi pemerintahan Kalurahan yang urutannya sesuai dengan kebutuhan pegawai dalam melayani masyarakat, mulai dari Lurah yang bekerja sama dengan BPK untuk membangun pemerintahan Kalurahan yang konsisten dan juga pelayanan masyarakat yang tepat sasaran akan kebutuhan masyarakat Kalurahan Widodomartani.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. BPK berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menetapkan peraturan desa bersama Lurah. Anggota BPK adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau disingkat BPK di Widodomartani merupakan unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan Widodomartani, yang adalah wakil dari masyarakat Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

## **II. Profil Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Blue Lagoon**

Kelompok Sadar Wisata atau serung disebut POKDARWIS adalah sekelompok warga masyarakat yang mempunyai kaitan mata pencaharian dari aktivitas wisata membentuk suatu wadah. Kelompok ini bersifat informal sebagai wadah bertukar pikiran, kegiatan, pembicaraan, dan pengembangan dalam rangka

mencapai tujuan agar wilayah mereka menjadi wilayah yang mempunyai daya tarik wisata. Kelompok sadar wisata adalah sarana penyaluran aspirasi dan komunikatif antara pengurus dan warga.

Pembentukan Kelompok sadar wisata ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada warga yang berada di sekitar lokasi pariwisata tentang pentingnya keterlibatan warga secara langsung dalam menjaga serta mengembangkan obyek wisata yang ada di masing-masing wilayah. Seperti dikemukakan (Nyoman S.Pandit, 2006:55) sifat ramah tamah rakyat Indonesia ini merupakan salah satu "model Potensial" yang besar dalam pariwisata. Disamping keindahan alam dan atraksi yang menarik, sifat ramah tamah ini juga merupakan "investasi tak nyata" dalam arti kata sesungguhnya pada industri pariwisata, karena rakyat Indonesia merupakan daya tarik tersendiri.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Fungsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah:

- 1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.

2) Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Dijadikan Desa Widodomartani sebagai Desa Wisata memberikan pemikiran baru bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Desa Wisata. Salah satunya adalah Pokdarwis sebagai organisasi internal yang membantu dalam setiap strategi maupun perencanaan mengenai pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon. Pokdarwis menjadi salah satu konsep dan syarat dalam pengembangan Desa Wisata dimana keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Dengan adanya keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari Pokdarwis dapat meningkatkan perannya sebagai pelaku pengembangan pariwisata, menumbuhkan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah serta dapat memperkenalkan, melestarikan, dan memanfaatkan potensi daya tarik yang ada di daerahnya.

Di tahap pengembangannya, Desa Wisata Blue Lagoon sudah melakukan perencanaan dalam proyek menjadikan desa mereka sebagai desa wisata seperti :

1. Tahap pertama, pendampingan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengurus Pokdarwis.
2. Tahap kedua, masyarakat tidak mau adanya hanya satu orang saja yang menonjol akan tetapi mereka ingin semua masyarakat terlibat.
3. Tahap ketiga, mereka sudah membentuk Pokdarwis sebagai organisasi *internal* dengan anggota seluruh masyarakat dusun dalam yang sudah dibentuk sejak bulan September 2015.

4. Tahap keempat, menciptakan perubahan dengan memberikan tanggung jawab kepada setiap pengurus dengan *job disc* masing-masing.

Penentuan Pokdarwis dilakukan dengan cara mufakat atau musyawarah dengan mengutamakan warga masyarakat dusun dalem yang tidak mampu serta tidak memiliki pekerjaan lain diluar Desa Wisata Blue Lagoon dengan memberikan gambaran bagaimana potensi mengenai mereka, memilih pengurus untuk Pokdarwis serta memberikan gambaran bagaimana *job disc* dari masing-masing pengurus. Alasan pemilihan anggota Pokdarwis dengan melihat kemampuan dan latar belakang diharapkan agar lebih mudah dalam berkomunikasi antar pengurus dan agar mereka lebih mudah dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Akan tetapi pengurus Pokdarwis yang ada di Desa Wisata Blue Lagoon belum sesuai dengan pedoman Pokdarwis yang diterbitkan oleh Kememparekraf (2012) yaitu dengan adanya pembina, penasehat, sekretaris atau humas, anggota, dan seksi-seksi. Desa Wisata Blue Lagoon belum memiliki pembina serta penasehat diluar kepengurusan Pokdarwis.

Pengurus dan anggota dari Pokdarwis adalah semua warga masyarakat dusun dalem, dan di Desa Wisata Blue Lagoon baik dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, maupun pemuda. Tetapi kebanyakan yang menjadi pengurus adalah kamu bapak-bapak karena banyak bapak-bapak warga masyarakat Dusun dalem yang tidak memiliki pekerjaan, baik itu yang memang tidak bekerja atau pun sudah pensiun sehingga lebih mudah untuk diajak kerja sama serta memiliki kemauan yang besar dalam berpartisipasi dan mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon.



Desa Wisata Blue Lagoon sudah memiliki struktur organisasi Pokdarwis, setiap seksi yang menjadi pengurus Pokdarwis memiliki *job disc* masing-masing.

### **Susunan Pengurus Desa Wisata Blue Lagoon**

Desa wisata Blue Lagoon diresmikan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo pada tanggal 15 Maret 2015 dengan nama Pemandian Tirtha Budhi Blue Lagoon yang kala itu bertepatan dengan hari air sedunia. Dan penetapan pengurus pemandian Tirtha Budhi Blue Lagoon sebagai berikut:

a). Penanggung jawab

Lurah Widodomartani : Heruyono, S.T

b). Pelaksana Operasional

1. Ketua Pokdarwis : Suhadi

Wakil Ketua : Sunar

Pembangunan : Arif A

Sekretaris : Yuda Ekap

Sumber Daya Manusia : Sutarto

Bendahara Umum : Hariyanto

Bendahara Tiket : Teguh H

Bendahara Minum : T.Widodo

Bendahara Parkir : M. Fajar

Bendahara Alat : Harjianto

Bendahara Toilet : Gandung

Anggota : Hanif

Suyanto

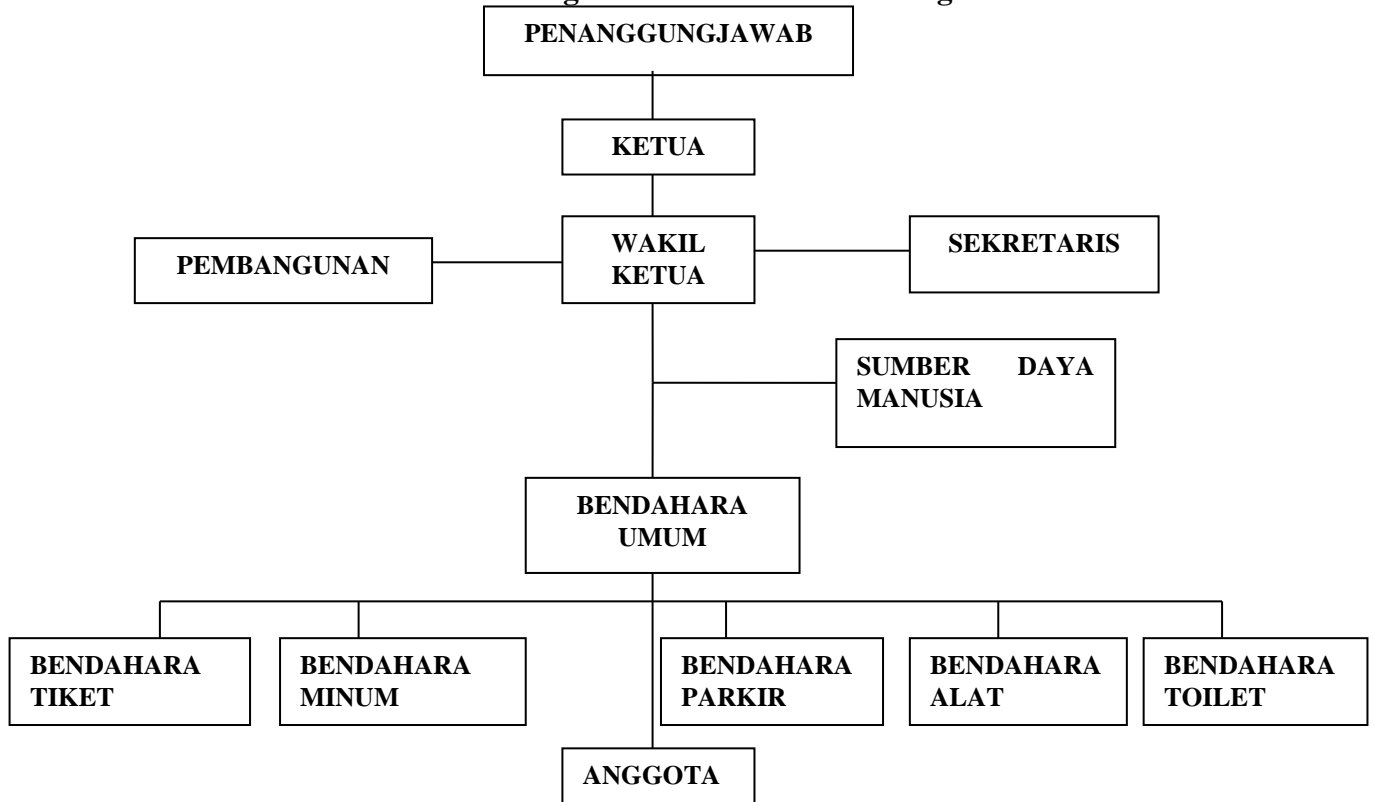
Bayu Widodo

Dwi H dan Sugono

Berikut bagan struktur pengelola Desa Wisata Blue Lagoon dapat lebih lanjut dilihat pada bagan II.2 dibawah ini :

### Bagan II.2

#### Struktur Pengelola Desa Wisata Blue Lagoon



(Sumber : Profil Pokdarwis 2022)

## **BAB IV**

### **PERSPEKTIF PEMERINTAHAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sejarah awal terbentuknya Blue Lagoon dapat disimpulkan bahwa gagasan ide awal pendirian Desa Wisata Blue Lagoon ini sepenuhnya dari warga masyarakat dusun dalam yang menyadari akan adanya potensi wisata tersebut, langkah selanjutnya pak dukuh beserta warga masyarakat dusun dalam melakukan musyawarah membahas terkait potensi wisata yang ditemukan lalu dalam musyawarah tersebut warga memilih ketua umum pengelola Blue Lagoon. Dalam rangkuman wawancara dijelaskan bahwa dalam proses pembentukan ketua umum pengelola serta dalam proses pembangunan blue lagoon tidak ada keterlibatan dari Pemerintah Kalurahan, karena Blue Lagoon itu dari warga oleh warga dan untuk warga jadi secara tidak langsung mereka tidak ingin keterlibatan pihak lain. Dari pendapat yang bertolak belakang antara ketua pengelola Blue Lagoon, Ibu Sri Rahayu mantan dukuh yang berbabat alas bersama warga masyarakat dengan Ibu Kalpika selaku Badan Permusyawaratan Kalurahan ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak Pemerintah Kalurahan dan pihak Pokdarwis selaku pengelola utama wisata kurang baik. Selain memiliki komunikasi yang kurang baik, Pemerintah Kalurahan juga tidak diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam mengembangkan Objek Wisata Blue Lagoon ini. Karena warga masyarakat yang menemukan potensi wisata tersebut, jadi dengan tindakan tidak langsung mereka mengklaim kepemilikan atas objek wisata Blue Lagoon ini.

Relasi Pemerintahan Desa dan Pokdarwis selama ini dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon dapat disimpulkan bahwa relasi yang terjalin diantara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dari awal Blue Lagoon terbentuk dan diresmikan pada tahun 2015 sampai saat ini hanya sekedar pendampingan administrasi saja. Bahkan pihak Kalurahan tidak bisa masuk kedalam ranah Pokdarwis untuk ikut mengelola wisata Blue Lagoon ini, meskipun dari Pokdarwis menyodori laporan pertanggung jawaban kepada Kalurahan tetapi laporan tersebut tidak bersifat rinci dan Pak Heruyono mengatakan bahwa ada batas yang tidak bisa dilewati oleh Kalurahan sehingga akses untuk mengetahui pengelolaan wisata Blue Lagoon ini sangatlah terbatas. Pihak Kalurahan pun menyadari bahwa dalam struktural pengelolaan wisata Blue Lagoon Kalurahan hanya memiliki hak untuk pendampingan. Tindakan yang dilakukan Pokdarwis ini jelas menunjukkan bahwa adanya dominasi kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan untuk menjadi pihak yang memiliki hak atas objek wisata Blue Lagoon, sikap menutup diri akan keterlibatan pihak lain juga menunjukkan bahwa Pokdarwis lah satu-satunya pihak yang memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengembangkan objek wisata Blue Lagoon ini. Bahkan dari pihak Pokdarwis tidak mengakui bahwa Pemerintah Kalurahan memberikan Pendampingan, justru Pokdarwis memiliki hubungan yang lebih intens dengan Dinas-Dinas Pariwisata.

Apakah ada kemunduran dari relasi antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan wisata Blue Lagoon ini yang dilakukan oleh Pokdarwis nampak meniadakan Pemerintah Kalurahan. Dengan

narasi-narasi yang disampaikan pengelola, lebih cenderung menutup diri untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kalurahan.

Apa yang dilakukan untuk mempererat relasi antara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis diatas dapat disimpulkan, bahwa dari pihak Pemerintah Kalurahan memiliki kesadaran mengenai lemahnya relasi antara Kalurahan dan Pokdarwis sehingga Kalurahan berencana dan sedang diproses untuk memasukan Desa Wisata Blue Lagoon kedalam BUMDesa. Harapannya dengan dimasukan Desa Wisata Blue Lagoon kedalam BUMDesa, Pemerintah Kalurahan dapat merangkul wisata Blue Lagoon dan menarik bantuan dana yang akan dikelola oleh Pokdarwis sebagai pengelola utama.

## **B. Saran**

Saran dari peneliti dalam penelitian ini terkait relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon yaitu :

- Pemerintah Kalurahan melakukan pertemuan dengan pihak Pokdarwis untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Blue Lagoon.
- Pemerintah Kalurahan diberikan ruang untuk mengelola salah satu unit usaha yang ada didalam wisata Blue Lagoon sehingga Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis dapat berkolaborasi dalam meningkatkan Desa Wisata Blue Lagoon dari segala aspek.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Candra, Wijaya.2016. *Dasar-Dasar manajemen*. Medan: Perdana Publishing
- Gamal, Suwanto.2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta; ANDI
- Lexy, J, Moleong.2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakrasa.
- Sugiyono.2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung; Alfabeta. Cetakan Kedua Belas.
- Wibowo.2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Foucault, Michele.1980. *Power/Knowledge, Selected Interviews and Other Writing*. New York : Phanteon Books.
- Li, Tannia Murray.2012. *The Will to Improve; Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Wahana Aksi Kritika.
- Salim. Peter. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wiradnyana, Ketut. 2018. *Michele Foucault; Areologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obot Indonesia.

### Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Industri Pariwisata

### Jurnal :

- Fauziah, Dona.2017. *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Ijin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*. Jom Fisip, vol.4,No.1, 1-15
- Imam, Taofik Chaerul.2017.*Relasi Intraorganisasi Pemerintah Kota Batu dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.

Kaltsum, A. Ummu.2018.*Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam penerbitan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Gowa)*.skripsi.UIN Alauddin. Makasar

Nisbatin, Gunawan.2018.*Relasi Sosial Pedagangan dalam Pemanfaatan Hutan Sebagai Wana Wisata (Studi kasus pedagang warungan diHutan Jati Goa Terawang Di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)*. Jurnal solidarity Unnes 7 (2).

Sintani, A.2020.*Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Sei Gohong. JISPAR, jurnal Ilmu Sosial, politik dan Pemerintahan, 9 (2), 28-37*

Jeanne, Dare N. Manik. 2013. *Jurnal masyarakat. Kekuasaan dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Masyarakat*. Volume 1.

Umar, Kamahi. 2017. *Jurnal Al-Khitabah. Teori Kekuasaan Michel Foucault; Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Volume III.

I, Nyoman Wijaya. 2012. *Jurnal Humaniora. Relasi Kekuasaan Dibalik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali*. Vollume 8.s

**Website :**

[id.wikipedia.org/wiki/Desa\\_Wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa_Wisata)

[eprints.uty.ac.id](https://eprints.uty.ac.id)

[jadusta.com/Desa/21441](https://jadusta.com/Desa/21441)

[etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/156842](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/156842)

[repo.iain.tulungagung.ac.id](https://repo.iain.tulungagung.ac.id)